

Kekerasan Perempuan

REPUBLIKA, 9/3/18.

Diprediksi Terjadi

● DIAN ERIKA NUGRAHENY

DENPASAR—Komisioner Komnas Perempuan Masruchan memprediksi kasus kekerasan terhadap perempuan akan terjadi selama Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya politisasi terhadap kekerasan terhadap perempuan dinilai sukses mendulang suara.

"Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik sangat mungkin terjadi kembali dalam Pilkada 2018," kata Masruchan dikutip *Antara* pada acara Peringatan Hari Perempuan Internasional di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Kamis (8/3).



Kasus itu akan diadopsi di daerah lain karena dinilai sukses mendulang suara.

Masruchan menambahkan, temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Misalnya, munculnya ancaman pemerkosaan jika tidak memilih calon tertentu. Masruchan juga mengklaim kasus di Jakarta yang muncul juga, termasuk ancaman jenazah perempuan tidak dishalatkan jika tidak memilih calon tertentu.

"Temuan kasus itu akan diadopsi di daerah lain karena dinilai sukses mendulang suara," ujarnya.

Dia menilai, semua daerah di Indonesia saat ini mungkin dan rawan terjadi kekerasan perempuan dalam politik. "Sarana yang digunakan adalah *cybercrime* atau kejahatan dunia maya," ujarnya.

Komnas Perempuan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam

Pilkada 2018 agar kejadian pada 2017 tidak terulang kembali.

Sementara itu, Direktur Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu, meminta semua perempuan menggunakan hak pilihnya agar ikut serta membangun bangsa dan negara.

"Mari sukseskan Pilkada 2018 dengan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani," ujarnya.

Dia juga meminta kepada perempuan di Pulau Dewata untuk lebih mempelajari rekam jejak calon kepala daerah dan gunakan hak pilih pada saat pemilihan umum, sehingga bisa menghasilkan pemimpin sesuai harapan rakyat.

Rawan konflik

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pilkada yang hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) kepala daerah berpotensi lebih rawan terjadi konflik. Sebanyak 41 daerah pelaksana Pilkada 2018 tercatat hanya memiliki dua paslon kepala daerah.

"Salah satu indikasi pilkada rawan konflik adalah ketika ada dua paslon yang berlaga di pilkada itu," ujar Ilham dikonfirmasi *Republika*, Kamis (8/3).

Ilham mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini juga disebut rawan konflik oleh kepolisian. Salah satu alasan Pilkada Jawa Tengah dianggap rawan konflik adalah karena ada dua paslon saja. "Padahal, menurut Bawaslu, Jawa Tengah termasuk daerah dengan indeks kerawanan pilkada yang rendah," katanya.

Adapun poin kerawanan yang dimaksud berkaitan dengan gesekan antarpaslon. Karena itu, KPU berupaya melakukan sosialisasi pilkada damai secara lebih masif. Sosialisasi pilkada damai lebih intensif dilakukan pada daerah yang hanya memiliki dua paslon dalam pilkada. "Khusus daerah yang memiliki kerawanan konflik dan hanya punya dua paslon kepala daerah, kami terus sampaikan agar pilkada harus terlaksana dengan lebih damai," tegas Ilham. ■ antara ed: agus raharjo